

## **Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo)**

**Deka Veronica<sup>1</sup>, Etik Winarni<sup>2</sup>, Ahmad Soleh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Jambi

Correspondence email: mas.soleh@yahoo.com

**Abstract.** Law No. 32 of 2004 on Villages that gives villagers the opportunity to organize and take care of their own households, which is organized by promoting the principles of democracy, participatory, equalization, justice and paying attention to the potential diversity of the region is the starting point of the development change from the periphery. And strengthened by government policy in 2015 the government issued the Village Fund policy, which was marked by the publication of PMK No.49 in 2016. The reforms are a form of seriousness from the government in trying to build the country through the village. But the goodwill is certainly not all can run in accordance with expectations given the competency conditions of human resources and various conditions. Therefore, in this study will evaluate the success of the use of village funds that have been given by the government, whether it has a positive impact on the community economy. This research will be conducted in Pelepat Ilir sub-district with case studies in Maju Jaya Village and Tirta Mulya using quantitative and qualitative descriptive methods. While the data used is primary data and secondary data obtained from interviews, questionnaires and literature from the village. The analytical tools used in this study are models of effectiveness, average difference testing and SWOT analysis. With the ultimate goal of wanting to get the results of the evaluation of the successful use of the Village Fund. The results showed that judged to be successful in the management of village funds, this was shown with an effectiveness rate reaching 100 percent (very effective). Furthermore, the use of Village Funds also has an impact on improving public services and health services but has not had an impact on improving the community economy.

**Keywords:** Evaluation of Village Fund management

### **Pendahuluan**

Untuk mencapai kesejahteraan dengan pemerataan prinsip keadilan adalah harga mutlak dalam pembangunan. Keadilan dimaksud adalah pembangunan dari baik bersifat fisik, sosial dan budaya sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Pembangunan berkeadilan tersebut diimplementasikan dalam bentuk otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintah sebagai urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasilnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Salah satu wujud pembangunan daerah adalah Pembangunan Desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah menetapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan ini merupakan wujud dari keinginan pemerintah yang dituangkan dalam Program Nawa Cita. Dasar dari kebijakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hasil pengamatan secara umum menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat manfaatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi sosial ekonomi (1) Bagaimana kondisi sosial ekonomi desa objek penelitian; (2) Seberapa tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa dilihat dari sisi efektivitas penggunaan anggaran dan efektivitas manfaat bagi ekonomi masyarakat (3) Bagaimana dampak adanya program Dana Desa terhadap perekonomian masyarakat.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Rad Van Indie pada masa penjajahan Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1817 di Indonesia. Dalam laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir pulau Jawa dan kemudian ditemukan juga desa-desa diluar kepulauan Jawa. Pengertian Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam undang-undang otonomi daerah Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 12 menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku pelaksanaan Inpers Dana Pembangunan Desa (1986) dijelaskan bahwa, dana pembangunan desa adalah sejumlah uang/dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa/kelurahan secara langsung, guna melaksanakan suatu rangkian atau proses pembangunan di desa yang harus di wujudkan dalam bentuk fisik proyek yang memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lingkungan desa dan kelurahan, atas beban APBN dalam rangka peerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dana pengembangan desa yang di berikan oleh pemerintah dan pihak ketiga itu hendaknya digunakan untuk membangun proyek-proyek yang di perlukan oleh masyarakat desa yang tercermin dalam program masing-masing seksi bapan perwakilan desa (BPD) dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengertian Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

### Metode

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *Generating and testing hypotheses*, bersifat *eksploratif* dengan dua lokasi penelitian yaitu di Desa Maju Jaya dan Desa Tirta Mulya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunde. Data primer bersumber dari lapangan yang berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung atau kuisisioner. Data sekunder berasal dari buku, dokumen, data statistik dan literature lainnya yang berasal dari desa yang menjadi objek penelitian. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian Kualitatif lebih berupa pendapat, maka wawancara menjadi perangkat yang sangat penting. Peneliti memilih jenis wawancara terstruktur pada rancangan awal dan tidak terstruktur pada pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya untuk menentukan jumlah responden menggunakan metode *non probability sampling* yang merujuk pada model Slovin dengan pendekatan *random sampling*. Adapun jumlah sampel responden yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 182 responden yang terdiri dari kelompok masyarakat umum, akademisi, aparatur pada dua desa yang menjadi tempat penelitian yang dihitung dengan metode Slovin sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel; N = Jumlah populasi (2000 kepala keluarga);  $e^2$  = Error yang ditolerir (5%)

$$\text{Maka: } N = \frac{2000}{(1 + 2000 \times 0.0025)} = 181,82 \text{ dibulatkan menjadi } 182$$

Sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 182 responden yang nantinya dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Penduduk per desa.

Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu menganalisis kondisi sosial ekonomi desa objek penelitian digunakan alat analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan statistik. Untuk masalah kedua bagaimana keberhasilan penggunaan Dana Desa (DD) dilihat dari sisi efektivitas dan manfaatnya dilakukan dengan model efektivitas dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Skor Efektifitas**

Skor efektivitas (dalam persen)	Keterangan
100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
60 ke bawah	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996

## Hasil

### *Kondisi Sosial Ekonomi Desa Maju Jaya*

#### *Profil desa*

Berdasarkan status perkembangan desa tahun 2017 dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) pemutakiran status perkembangan desa indeks pembangunan membangun (IDM) maka desa majujaya masuk dalam kelompok desa berkembang. Adapun bagian dari indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga dimensi yaitu indkes ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Dari hasil pemutakiran data pada maret tahun 2013 yang dilakukan oleh kecamatan dan kepala desa diperoleh bahwa desa majujaya memiliki nilai IKS (0,6914), IKE (0,6500), IKL (0,667) dan nilai IDM (0,6694).

Berdasarkan data monografi di ketahui bahwa jumlah penduduk Desa Maju Jaya sebanyak 2700 jiwa dengan 750 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduk desa majujaya adalah suku jawa, karena latar belakang penduduk dari desa ini adalah masyarakat transmigran dari pulau jawa. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Maju Jaya masih memegang erat prinsip gotong royong, baik dalam kegiatan kebersihan desa, pembangunan rumah dan berbagai acara lainnya. Tingkat pendidikan masyarakat di desa majujaya masih tergolong rendah dimana mayoritas berpendidikan SD dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan sekolah menengah atas. Mata pencaharian dari penduduk 98 persen sebagai petani dan pedagang sisanya sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta.

#### *Kondisi sosial ekonomi masyarakat*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 182 informan di Desa Maju Jaya maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Majujaya rata-rata bekerja pada lahan perkebunannya sendiri, dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai buruh
2. Mayoritas masyarakat bekerja pada perkebunan kelapa sawit dan karet
3. Secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi meskipun dalam kondisi tertentu seringkali kurang
4. Jumlah penduduk miskin di desa ini hanya sebesar 1 persen dari total jumlah penduduk yang ada

#### *Analisis Tingkat Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (DD)*

##### *Analisis efektivitas penggunaan anggaran*

Mengukur tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya digunakan alat analisis tingkat efektifitas. Analisis ini didasarkan pada perbandingan besarnya jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan dalam pemerintahan desa. Tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) pada Desa Maju Jaya pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan data yang sangat efektif. Hal ini terlihat dari tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 100 persen, baik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil perhitungan tingkat efektifitas dari penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya sebagai berikut:

$$2016 = \frac{601.200.000}{601.200.000} \times 100 = 100$$
$$2017 = \frac{765084000}{765084000} \times 100 = 100$$

$$2018 = \frac{714.733.000}{714.733.000} \times 100 = 100$$
$$2019 = \frac{798.003.000}{798.003.000} \times 100 = 100$$

Selama 4 tahun berjalan, pemerintah Desa Maju Jaya termasuk dalam kategori pemerintah desa yang aktif dengan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari kinerjanya melalui penyerapan anggaran secara maksimal yang digunakan dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya adalah sangat efektif.

#### ***Analisis efektivitas manfaat bagi perekonomian masyarakat.***

Mengukur tingkat efektifitas dari manfaat penggunaan Dana Desa (DD) bagi perekonomian masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan kuisioner secara langsung kepada 182 responden terpilih. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diperoleh beberapa kesimpulan manfaat penggunaan Dana Desa (DD) dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya:

1. Ekonomi penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan bagi masyarakat masih belum memberikan dampak secara signifikan. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak tepat pada infrastruktur yang berkaitan dengan sumber pendapatan masyarakatnya.
2. Pelayanan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya memberikan dampak cukup besar bagi masyarakat. ini terjadi karena pengalokasian dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan, dan pembangunan fasilitas pelayanan terutama fasilitas kesehatan.
3. Pendidikan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya belum secara efektif berdampak pada tingkat pendidikan masyarakat karena alokasi penggunaan masih belum menyentuh pada bidang pendidikan.
4. Lingkungan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya memberikan perubahan yang signifikan terhadap lingkungan terutama pada fasilitas umum, sehingga menambah keasrian. Hal ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa (DD) fokus pada pembangunan jalan desa, drainase lingkungan, lampu jalan, taman dan fasilitas umum lainnya.

#### ***Analisis Dampak Program Dana Desa (DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat***

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan dilapangan kepada para 182 responden di Desa Maju Jaya maka diperoleh hasil bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa (DD) masih belum berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di desa tersebut. Dari data yang diperoleh tersebut juga belum bisa dihitung dengan berdasarkan nilai alat analisis uji beda karena dari hasil pengamatan dan wawancara dari seluruh responden memberikan keterangan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) tidak menyentuh pada pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian masyarakat tetapi hanya pada infrastruktur pelayanan dan lingkungan dasar. Seperti pembangunan drainase jalan pemukiman, pembangunan posyandu, pembukaan jalan pemukiman, pembangunan sarana olahraga, rehabilitasi balai desa, pembangunan gedung puskesmas baru, pembelian mobil ambulans dan rehabilitasi gedung taman kanak-kanak.

Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat juga belum memberikan pengaruh yang signifikan karena pemberdayaan yang dilakukan tidak langsung terkait dengan apa yang menjadi keahlian dari masyarakat setempat dan merupakan hal baru bagi masyarakat sehingga output yang dihasilkan dari pemberdayaan tersebut belum mampu bersaing dengan hasil produksi yang sudah dihasilkan dilapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan dampak program Dana Desa (DD) melalui pembangunan di desa maju jaya tidak dapat dihitung dengan menggunakan modal uji beda karena secara riil data menunjukkan penggunaan Dana Desa (DD) tidak bersentuhan secara langsung dengan kegiatan masyarakat dan pembangunannya masih pada infrastruktur pelayanan dasar.

#### ***Simpulan***

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya adalah sangat efektif..
2. Penggunaan Dana Desa (DD) memberikan dampak pada peningkatan pada pelayanan publik dan pelayanan kesehatan tetapi belum berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Azwardi, A. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29-41.
- Hazmi, A.I. 2016. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kab.Lamongan. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 315-326
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R.A. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14-25.
- Kusuma, A.R. 2017. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 5(2), 112-127.
- Larasati, D.C., & Adhitama, M.O. 2018. Monitoring Dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur). *Reformasi*, 7(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Noverman, Y. 2019. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(2), 68-81.
- Rahayu, Y., dan Winarni, E. 2018, Evaluasi dan optimalisasi penggunaan alokasi Dana Desa. *J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains*, 5(1), 184-189.
- Samborarak, A. 2014, Evaluasi program alokasi Dana Desa di desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Soleh, A. 2017. Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Soleh, A. 2018. Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 79-90.
- Triani, N.N.A., & Handayani, S. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal akuntansi multiparadigma*, 9(10), 136-155.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, G.A. 2017. Evaluasi pengelolaan alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 13(3), 313-325.